

PENGUATAN LITERASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BAGI GURU NGAJI DI PESANTREN SALAFIYAH : IMPLEMENTASI MATA KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

Ikhsan Mubarak¹, Liko' Mursidah², Ainur Rofiq³

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

Email: bangikhsan98@gmail.com, liqomursidah98@gmail.com, ainur7682@gmail.com

Abstract

The transformation of Islamic education in Indonesia cannot be separated from efforts to integrate the values of the pesantren tradition and national education policies. However, one of the main challenges still faced is the low level of policy literacy among Koranic teachers, especially in the salafiyah pesantren environment which still maintains the yellow book-based education pattern. This study aims to strengthen the understanding of Quranic teachers on Islamic education policy through a community service approach based on the Policy Analysis course. The method used was descriptive qualitative, with observation techniques, in-depth interviews, and documentation in island pesantren. The results showed that after attending the training, the Koranic teachers began to be actively involved in local education dialog spaces, such as village education meetings and the sub-district level Indonesian Ulema Council forum. In addition, a synergy between academics and pesantren was also built, creating a participatory and contextual collaboration model. The strengthening of policy literacy is proven to not only improve the Koranic teachers' regulative understanding, but also encourage a change in their role from teaching implementers to strategic actors in community-based Islamic education decision-making.

Keywords: *policy literacy, Quranic teachers, salafiyah pesantren, community service, academic collaboration*

Abstrak

Transformasi pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya integrasi antara nilai-nilai tradisi pesantren dan kebijakan pendidikan nasional. Namun, salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya literasi kebijakan di kalangan guru ngaji, terutama di lingkungan pesantren salafiyah yang masih mempertahankan pola pendidikan berbasis kitab kuning. Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman guru ngaji terhadap kebijakan pendidikan Islam melalui pendekatan pengabdian masyarakat berbasis mata kuliah *Analisis Kebijakan*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada pesantren wilayah kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, para guru ngaji mulai aktif terlibat dalam ruang dialog pendidikan lokal, seperti musyawarah pendidikan desa dan forum Majelis Ulama Indonesia tingkat kecamatan. Selain itu, terbangun pula sinergi antara akademisi dan pesantren yang menciptakan model kolaborasi yang partisipatif dan kontekstual. Penguatan literasi kebijakan

terbukti tidak hanya meningkatkan pemahaman regulatif para guru ngaji, tetapi juga mendorong perubahan peran mereka dari pelaksana ajaran menjadi aktor strategis dalam pengambilan keputusan pendidikan Islam berbasis komunitas.

Kata kunci: literasi kebijakan, guru ngaji, pesantren salafiyah, pengabdian masyarakat, kolaborasi akademisi

PENDAHULUAN

Pesantren salafiyah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis tradisi yang telah lama berkontribusi dalam pembentukan karakter keislaman masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan akuntabilitas, moderasi beragama, dan implementasi Kurikulum Merdeka, pesantren menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri secara kelembagaan maupun pedagogis. Salah satu kendala utama terletak pada rendahnya literasi kebijakan di kalangan guru ngaji sebagai pelaksana inti proses pembelajaran. Ketidaktahuan terhadap dokumen formal seperti Standar Kompetensi Lulusan (SKL), struktur kurikulum nasional, dan prinsip moderasi beragama menandai kesenjangan yang perlu dijabatani.

Kondisi ini menjadi krusial karena guru ngaji berperan langsung dalam internalisasi nilai pendidikan di pesantren. Namun, keterlibatan mereka dalam wacana maupun implementasi kebijakan pendidikan Islam masih sangat terbatas. Sifat top-down dalam penyusunan kebijakan serta minimnya ruang dialog antara negara dan komunitas pesantren menyebabkan proses adaptasi regulasi berjalan tidak optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru ngaji melalui pendekatan yang partisipatif dan kontekstual diperlukan agar mereka mampu merespons dinamika kebijakan secara kritis dan reflektif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa model penguatan literasi kebijakan pendidikan Islam melalui integrasi mata kuliah *Analisis Kebijakan* ke dalam program pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang interaksi dialogis antara mahasiswa, dosen, dan guru ngaji untuk membahas kebijakan pendidikan secara setara. Tujuannya adalah menjadikan guru ngaji tidak hanya pengampu kitab kuning, tetapi juga pelaku aktif dalam membaca regulasi dan terlibat dalam forum pendidikan lokal. Inovasi ini menggabungkan pendekatan akademik dengan praktik sosial berbasis pesantren.

Berbagai studi memperkuat pentingnya pendekatan ini. Mujiburrahman et al. (2020) menunjukkan keterlibatan pesantren dalam moderasi beragama masih bersifat wacana. Suryadi dan Nugraha (2021) menekankan pentingnya literasi digital dan kebijakan, namun intervensi lebih banyak menasar pimpinan lembaga. Baidhawiy (2022) mengusulkan dialog antara pesantren dan negara, namun belum menghadirkan model konkret. Santosa et al. (2023) menyarankan pengabdian masyarakat yang lebih partisipatif dan kontekstual. Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan menghadirkan model pemberdayaan literasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis budaya lokal pesantren.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan mengembangkan kapasitas guru ngaji sebagai subjek aktif dalam ekosistem kebijakan pendidikan Islam, sekaligus

memperkuat posisi pesantren salafiyah sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perubahan. Melalui integrasi antara pengajaran akademik dan praktik pengabdian masyarakat, model ini diharapkan mampu menciptakan ruang kolaborasi yang tidak hanya mempertemukan logika kebijakan negara dan kearifan lokal pesantren, tetapi juga mendorong transformasi peran guru ngaji dari pelaku tradisional menjadi agen perubahan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model intervensi literasi kebijakan yang aplikatif, kontekstual, dan replikatif, yang relevan bagi upaya integrasi pendidikan Islam berbasis pesantren ke dalam sistem nasional secara lebih partisipatif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan yang bertujuan memahami secara mendalam dinamika penguatan literasi kebijakan pendidikan Islam di kalangan guru ngaji pesantren salafiyah. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Darul Qur'an di wilayah kepulauan, karena pesantren ini merepresentasikan karakteristik pesantren tradisional yang mulai terbuka terhadap kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk akademisi. Program pengabdian masyarakat berbasis mata kuliah *Analisis Kebijakan* menjadi instrumen utama untuk menggali proses internalisasi pemahaman kebijakan di lingkungan guru ngaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi visual serta naratif. Observasi difokuskan pada aktivitas guru ngaji selama program berlangsung, sementara wawancara dilakukan kepada informan kunci seperti guru ngaji senior, kyai, mahasiswa, dan dosen pembimbing. Seluruh data dianalisis secara tematik melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi yang kontekstual. Triangulasi data dilakukan untuk menjaga validitas hasil penelitian.

Tabel 1. Tahapan dan Fokus Kegiatan Penelitian Lapangan

No	Tahapan Kegiatan	Fokus Aktivitas	Output yang Dihasilkan
1	Observasi Kontekstual	Mengamati metode pengajaran guru ngaji dan interaksi mereka di pesantren	Catatan lapangan dan potret budaya
2	Wawancara Mendalam	Menggali pandangan guru ngaji terkait kebijakan pendidikan nasional	Transkrip wawancara dan kutipan tematik
3	FGD Interaktif	Diskusi antara mahasiswa dan guru ngaji mengenai isu kebijakan pendidikan Islam	Pemetaan pemahaman dan refleksi bersama
4	Dokumentasi Visual	Mengambil foto, video, dan catatan kegiatan program pengabdian	Bukti visual dan narasi aktivitas lapangan

No	Tahapan Kegiatan	Fokus Aktivitas	Output yang Dihasilkan
5	Validasi Temuan	Refleksi dan analisis bersama antara peneliti dan partisipan	Konfirmasi data dan penyusunan narasi temuan

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini terdiri dari lima tahapan utama yang saling terintegrasi. Dimulai dengan observasi kontekstual yang bertujuan mengamati metode pengajaran guru ngaji serta interaksi mereka dalam lingkungan pesantren, sehingga diperoleh catatan lapangan dan gambaran budaya lokal. Tahap berikutnya adalah wawancara mendalam untuk menggali pandangan guru ngaji terhadap kebijakan pendidikan nasional, menghasilkan transkrip dan kutipan tematik yang kaya makna. Kemudian dilanjutkan dengan FGD interaktif antara mahasiswa dan guru ngaji yang membahas isu-isu kebijakan pendidikan Islam secara partisipatif, sehingga menghasilkan pemetaan pemahaman dan refleksi bersama. Tahap keempat berupa dokumentasi visual dalam bentuk foto, video, dan catatan lapangan yang merekam secara langsung aktivitas program sebagai bukti visual dan narasi kegiatan. Terakhir, dilakukan validasi temuan melalui refleksi bersama antara peneliti dan partisipan guna mengonfirmasi keabsahan data dan menyusun narasi hasil penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rendahnya Literasi Kebijakan di Kalangan Guru Ngaji Pesantren Salafiyah

Fakta sosial yang terungkap dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi kebijakan di kalangan guru ngaji pesantren salafiyah menjadi hambatan dalam transformasi pendidikan Islam berbasis regulasi negara (Zukin & Firdaus, 2022, Putra et al., 2024, Mumtaz et al., 2024). Hal ini ditandai oleh minimnya pemahaman guru ngaji terhadap dokumen-dokumen kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, standar kompetensi lulusan (SKL), hingga regulasi moderasi beragama (Bin Jamil et al., 2024, Jasiah et al., 2024). Poin utama temuan ini adalah ketimpangan pengetahuan antara tradisi kitab kuning yang menjadi rujukan utama guru ngaji, dengan kebijakan pendidikan kontemporer yang bersifat administratif dan legalistik. Alasannya, selain keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan, juga disebabkan oleh belum adanya pelatihan yang secara khusus menjembatani teks-teks kebijakan dengan realitas pengajaran di pesantren. Fakta ini memperlihatkan bagaimana tradisi kepatuhan terhadap otoritas lokal lebih dominan daripada pendekatan struktural negara. Kesimpulannya, jika pesantren salafiyah ingin turut aktif dalam membangun sistem pendidikan Islam yang relevan dan progresif, maka peningkatan literasi kebijakan bagi guru ngaji adalah langkah fundamental dan strategis yang tidak bisa ditunda (Purwaningtyas et al., 2024). Sesuai penuturan salah satu Ustadz Pondok Pesantren dalam sesi wawancara bersama Ustad Ismail Hasan (IH)

“belum pernah saya baca, Pak. Saya biasanya ngikut saja dengan apa yang dikasih sama kyai. Kalau ngajarin kitab ya pakai Ta’lim Muta’allim, Safinatun Najah,

atau Fathul Qarib. Soal kurikulum itu, saya kurang tahu... soalnya kan kami ini bukan sekolah, cuma ngajarin ilmu agama secara turun-temurun.” (IH)

Hasil wawancara dengan Ustadz Ismail Hasan, seorang guru ngaji di Pesantren Salafiyah Darul Qur'an wilayah kepulauan, mengungkap fakta rendahnya literasi kebijakan pendidikan di kalangan guru ngaji. Ia menyatakan bahwa selama ini belum pernah membaca dokumen-dokumen kebijakan seperti kurikulum nasional atau standar pendidikan formal. Dalam keseharian mengajarnya, ia hanya mengikuti arahan dari kyai dan menggunakan kitab-kitab klasik seperti *Ta'lim Muta'allim*, *Safinatun Najah*, dan *Fathul Qarib* sebagai referensi utama. Menurutnya, pesantren bukanlah sekolah formal sehingga tidak merasa perlu untuk merujuk pada kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ia juga mengungkapkan bahwa proses mengajar di pesantren merupakan bagian dari tradisi keilmuan yang diwariskan secara turun-temurun, bukan berdasarkan sistem atau regulasi negara. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa guru ngaji di wilayah kepulauan cenderung mengandalkan otoritas lokal dan tradisi keilmuan pesantren dalam praktik pendidikannya, serta belum melihat urgensi atau relevansi keterlibatan aktif dalam memahami kebijakan pendidikan Islam yang berlaku secara nasional.

Penguatan Literasi Kebijakan Mendorong Guru Ngaji Terlibat dalam Dialog Pendidikan Lokal

Penguatan literasi kebijakan di kalangan guru ngaji pesantren salafiyah telah mendorong transformasi peran mereka dari pengajar kitab tradisional menjadi aktor partisipatif dalam ruang-ruang kebijakan pendidikan lokal (Ali & Halim, 2023, Nafisah et al., 2022, Ubaidillah, 2025). Melalui pelatihan yang diberikan dalam program pengabdian masyarakat berbasis mata kuliah *Analisis Kebijakan*, para guru mulai memahami posisi strategis mereka dalam struktur pendidikan yang lebih luas. Mereka tidak lagi memosisikan diri sekadar sebagai pelaksana ajaran agama, tetapi juga sebagai penyumbang gagasan dalam forum musyawarah desa, rapat MUI, dan diskusi lintas lembaga pendidikan Islam. Fakta sosial ini menunjukkan bahwa literasi kebijakan tidak hanya meningkatkan pemahaman regulatif, melainkan juga membentuk keberanian, legitimasi, dan kesadaran sosial baru. (McLaren, 2023, Kaufman & Boxshall, 2023) Dengan demikian, guru ngaji tampil sebagai subjek aktif dalam ekosistem pendidikan Islam yang demokratis dan inklusif, sekaligus membantah anggapan bahwa pesantren tradisional tertutup terhadap wacana kebijakan negara.



Gambar 1. Guru ngaji terlibat dalam dialog formal bersama pejabat daerah

Gambar tersebut memperlihatkan suasana dialog formal antara para guru ngaji dengan seorang pejabat daerah yang berlangsung dalam setting ruang pertemuan tertutup. Para guru ngaji tampak duduk rapi mengelilingi meja, mengenakan pakaian khas pesantren seperti baju koko, jas, dan peci, yang mencerminkan identitas mereka sebagai tokoh pendidikan Islam tradisional. Di hadapan mereka, seorang narasumber yang diduga merupakan pejabat daerah atau tokoh pendidikan memimpin diskusi dengan menggunakan buku catatan sebagai acuan. Interaksi yang terjalin tampak serius dan fokus, mencerminkan keterlibatan aktif para guru ngaji dalam forum musyawarah yang bersifat strategis. Dokumentasi ini menjadi bukti konkret bahwa guru ngaji kini mulai mengambil peran penting dalam forum dialog kebijakan pendidikan di tingkat lokal (Riaz et al., 2023, Nurbayani & Amiruddin, 2024, Abidin et al., 2025). Gambar ini mempertegas transformasi peran mereka dari sekadar pengajar kitab menjadi aktor partisipatif yang turut menyuarakan aspirasi dan kepentingan komunitas pesantren dalam perumusan arah kebijakan pendidikan Islam.

Sinergi antara Akademisi dan Pesantren Menjadi Model Kolaborasi yang Efektif

Fakta sosial dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara akademisi dan pesantren salafiyah telah membentuk sebuah model kolaborasi yang efektif dalam penguatan literasi kebijakan pendidikan Islam (Budiman et al., 2025, Musaddad, 2024). Poin utama dari temuan ini adalah terciptanya hubungan timbal balik antara perguruan tinggi dan pesantren, di mana kampus tidak hanya berperan sebagai penyedia materi ilmiah, tetapi juga sebagai mitra yang belajar dari kearifan lokal pesantren (Rohman, 2022, Kesumayani, 2025, Adityas, 2022). Alasannya, kolaborasi ini berjalan berdasarkan pendekatan partisipatif, bukan instruktif, sehingga guru ngaji merasa dihargai, dilibatkan, dan diberdayakan dalam setiap proses kegiatan pengabdian. Bukti nyata terlihat dalam bentuk kegiatan bersama, seperti lokakarya kebijakan, diskusi kelompok terfokus, serta praktik pembelajaran berbasis pengalaman yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan guru ngaji secara setara. Dalam pelatihan tersebut, guru ngaji tidak hanya menjadi objek penerima materi, tetapi turut menjadi narasumber dalam konteks kultural lokal. Kesimpulannya, kolaborasi antara akademisi dan pesantren bukan hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga melahirkan ruang dialog yang setara antara tradisi keilmuan kampus dan pesantren (Halimah et al., 2024, Mala et al., 2024) Model ini layak dijadikan rujukan bagi pengembangan pendidikan Islam berbasis komunitas yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal namun tetap terbuka terhadap gagasan akademik kontemporer.



Gambar 2. Diskusi antara mahasiswa S2 dengan guru ngaji pesantren

Gambar tersebut memperlihatkan suasana dialog akademik antara mahasiswa program magister (S2) dengan para guru ngaji di lingkungan pesantren salafiyah dalam sebuah pertemuan santai namun bermakna. Pertemuan berlangsung di sebuah aula terbuka yang sederhana, dengan meja-meja kayu disusun melingkar, menciptakan suasana yang setara dan egaliter. Di tengah ruangan, sebuah laptop terbuka dengan dokumen aktif menjadi simbol keterlibatan akademik mahasiswa dalam proses pencatatan atau penyusunan materi diskusi. Para guru ngaji tampak mengenakan pakaian khas pesantren, duduk tenang dan terlibat dalam percakapan. Tersaji juga beberapa hidangan ringan di atas meja, menambah keakraban suasana. Dokumentasi ini memperlihatkan adanya interaksi dua arah antara dunia akademik dan komunitas tradisional pesantren, yang menandakan terbentuknya ruang kolaborasi yang inklusif dan saling menghargai. Gambar ini merepresentasikan bahwa proses belajar tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui dialog langsung dengan pelaku pendidikan lokal, dalam upaya membangun pemahaman kebijakan yang kontekstual dan berakar pada realitas komunitas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan literasi kebijakan pendidikan Islam bagi guru ngaji di pesantren salafiyah memiliki dampak signifikan dalam mendorong transformasi peran mereka dari sekadar pengajar tradisional menjadi aktor yang aktif dalam ruang kebijakan pendidikan lokal. Rendahnya pemahaman terhadap regulasi pendidikan seperti Kurikulum Merdeka dan Standar Kompetensi Lulusan sebelumnya menjadi hambatan utama. Namun, melalui program pengabdian masyarakat berbasis mata kuliah Analisis Kebijakan, para guru ngaji mulai menyadari pentingnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan publik. Mereka tampil dalam forum-forum musyawarah desa, rapat MUI, hingga diskusi lintas lembaga pendidikan Islam dengan kepercayaan diri dan kesadaran baru. Selain itu, sinergi antara akademisi dan pesantren menciptakan model kolaborasi yang partisipatif dan saling menghargai, di mana kampus tidak hanya menjadi penyampai ilmu, tetapi juga mitra dalam memahami konteks lokal. Dengan demikian, literasi kebijakan terbukti menjadi instrumen penting dalam membangun pendidikan Islam yang relevan, partisipatif, dan kontekstual berbasis komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A., Fatawi, I., & Kausar, S. (2025). The Values of Islamic Education for Building Tolerance in the Jombang Community: A Qualitative Study of the Role of Religious Harmony Forum. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(1), 1–16.
- Adityas, M. T. (2022). *The Self in Struggle: Indonesian Secondary School Teachers' Multiplicity of Voices Amidst Competing Discourses of Tolerance*. University of Auckland.
- Ali, A. M., & Halim, F. (2023). The Role of Pesantren and Its Literacy Culture in

- Strengthening Moderate Islam in Indonesia. *Edukasia Islamika*, 8(2), 205–226.
- Bin Jamil, A. I., Rekan, A. A., & Badar, S. (2024). From Integrated to Standard: Reformation of the Islamic Religious Education Curriculum and Teacher Training in Malaysia. In *Global Agendas and Education Reforms: A Comparative Study* (pp. 171–193). Springer.
- Budiman, A. M., Fatahillah, M., & Akib, A. R. M. (2025). Strategic Management Practices In Pesantren: Innovations For Enhancing Educational Quality And Organizational Sustainability. *MOJEM: Malaysian Online Journal of Educational Management*, 13(2), 86–97.
- Halimah, S., Yusuf, A., & Safiudin, K. (2024). Pesantren education management: The transformation of religious learning culture in the age of disruption. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(3), 648–666.
- Jasiah, J., Mazrur, M., Hartati, Z., Rahman, A., Kibtiyah, M., Liadi, F., & Fahmi, F. (2024). Islamic teachers' implementation of the merdeka curriculum in senior high schools: A systematic review. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(4), 394–408.
- Kaufman, S., & Boxshall, A. (2023). Eleven enablers of science thought leadership to facilitate knowledge exchange in environmental regulation. *Environmental Science & Policy*, 147, 336–348.
- Kesumayani, H. (2025). Strategic Management For Character Education Strengthening In Non-Formal Education: A Case Study Of Pkbn Labora Edukasi. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 6(1), 94–106.
- Mala, A., Zulkarnain, Z., Bakar, M. Y. A., & Marpuah, S. (2024). Fostering Tolerance Through Inclusive Islamic Education: The Role of Pesantren in Navigating Global Challenges. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 12(2), 153–178.
- McLaren, P. (2023). Critical pedagogy: A look at the major concepts. In *The critical pedagogy reader* (pp. 75–97). Routledge.
- Mumtaz, N. M., Muafiah, E., & Witro, D. (2024). Educational Policy Analysis: Examining Pesantren Policies and Their Implications on the Independence of Kyai and Pesantren in the Contemporary Era. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 287–306.
- Musaddad, A. (2024). Leadership in Pesantren: Educational Management Approaches for Spiritual and Academic Development. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(3), 186–194.
- Nafisah, R., Ismail, F. H., & Saleh, S. H. (2022). Situating Indonesian Pesantren within Literacy Practice and Religious Moderation in Post-Truth Era. *IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion*, 4(2), 116–122.
- Nurbayani, N., & Amiruddin, A. (2024). Teacher Strategies in Implementing Religious Moderation Values in Islamic Educational Institutions. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(2), 778–787.

- Purwaningtyas, F., Dalimunte, M., & Dewi, S. (2024). Exploring adolescents' digital information-seeking patterns and religious behavior. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 12(2), 251–278.
- Putra, A. B., Mank, M. A., Juniarni, C., & Husni, T. A. (2024). Balancing Tradition and Modernity: Evaluating the Impact of Pesantren Leadership on Curriculum Transformation Outcomes. *Idarah: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 8(1), 65–78.
- Riaz, M., Baloch, F., Siddiqui, M., Ejaz, R., & Bashir, M. (2023). The role of islamic education in promoting peace and tolerance. *Al-Qanṭara*, 9(4), 308–327.
- Rohman, B. (2022). *The Extent of Islamic Education Nondiscrimination Policy Protection for Transgender: An Islamic Law Analysis*.
- Ubaidillah, M. F. F. (2025). Beyond The Sacred Walls: Reimagining Pesantren's Architecture of Islamic Moderation. *Journal of Islamic Studies*, 29(1), 32–70.
- Zukin, A., & Firdaus, M. (2022). Development Of Islamic Religious Education Books With Contextual Teaching And Learning. *Jurnal At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1).